

Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

I Ketut Darma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Email korespondensi: tutdarma@gmail.com

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk menghitung potensi dan target penerimaan pajak daerah Provinsi Bali tahun 2021 khususnya BBNKB. Selanjutnya studi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi Bali (Bappenda) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan penerimaan pajak daerah dalam rangka untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2021. Studi ini hanya menghitung potensi pajak daerah, serta menghitung target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2021, berupa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menghitung estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di instansi yang terkait, terutama di Bappenda Provinsi Bali, BPS, GAIKINDO, AISI dan beberapa sumber lainnya dari internet yang relevan. Estimasi agregat ini memberi indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada menjadi realisasi. diikuti dengan kajian/kebijakan pada basis mikro guna mengetahui dan hambatan (risiko) yang terjadi di lapangan dan faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi dengan analisis trend dan regresi linier berganda. Dengan demikian, berdasarkan basis teori maka diharapkan pemerintah daerah mampu membuat kebijakan yang spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari hasil perhitungan dengan menggunakan empat metode menghasilkan hasil berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tidak terlalu *significant*. Hasil analisis ini sebagai bahan pertimbangan Bapenda dalam menentukan target BBN_KB I untuk tahun 2021. Tercapainya estimasi potensi pajak menjadi realisasi sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan sumber daya manusia.

Kata kunci: pajak daerah, bea balik nama kendaraan bermotor, risiko, potensi pajak, pandemic covid 19

Abstrac

The purpose of this study is to calculate the potential and target of local tax revenue in Bali Province in 2021, especially BBNKB. Furthermore, this study is expected to be of benefit to the Bali Provincial Government (Bappenda) as a material for consideration in planning local tax revenue in the context of preparing the Bali Province Regional Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBD) for 2021. This study only calculates the potential for regional taxes, and calculating the target of regional tax revenue for 2021, in the form of Transfer of Motor Vehicle Title Fee (BBNKB). Calculating the estimated potential local taxes is done in an aggregate manner using secondary data available from the relevant agencies, especially at the Bali Provincial Bappenda, BPS, GAIKINDO, AISI and several other relevant internet sources. This aggregate estimate gives an indication of how much potential there is to be realized. followed by studies / policies on a micro basis in order to identify obstacles (risks) in the field and economic and non-economic factors with trend analysis and multiple linear regression. Thus, based on the theoretical basis, it is hoped that the local government will be able to make specific policies to bring the potential into realization. The results of this study indicate that the results of calculations using four methods yield different results, but the differences are not very significant. The results of this analysis are used as material for Bapenda's consideration in determining the BBN_KB I target for 2021. The achievement of tax potential estimates becomes a realization very much depends on policies and human resource capabilities.

Keywords: local taxes, transfer fees for motorized vehicles, risk, tax potential, COVID-19 pandemic

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar untuk Pemerintah Republik Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai sumber penerimaan terbesar Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia dan yang lainnya, sehingga dengan demikian pajak sangat berperanan penting terhadap kegiatan perekonomian masyarakat (Gaughan & Javalgi, 2018; Priliandani & Saputra, 2019). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga untuk modal pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta dapat memberikan potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri, guna untuk membiayai pembangunan daerahnya. Potensi pajak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006; Saputra dkk., 2019).

Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Mawarni, 2013). Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah, dan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Jadi, agar Pemerintah Daerah tetap dapat melakukan kegiatan pembangunan, maka mereka harus mampu memaksimalkan sumber-sumber dari penerimaan daerah

tersebut salah satunya adalah dari pajak daerah, dimana pajak daerah ini sebagai dasar dalam menyusun rencana pendapatan (Hatta & Riduan, 2017).

Bali merupakan salah Provinsi di Indonesia tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup untuk membiayai pembangunan dan hanya mengandalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hampir 85% Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali di sumbang oleh pajak daerah, sedangkan komponen pajak daerah antara lain: 1). Pajak Kendaraan Bermotor, 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4). Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014. Dari empat komponen tersebut yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kemampuan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian regional, nasional dan internasional, karena daerah Bali perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata. Pajak Daerah untuk provinsi yang terdiri dari; 1). Pajak Kendaraan Bermotor; 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4). Pajak Air Permukaan dan 5). Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan daerah Bali. Dalam penyusunan anggaran daerah untuk tahun-tahun yang akan datang, maka organisasi perangkat daerah akan membuat perencanaan daerah dengan membuat target pendapatan daerah, sedangkan Bapenda sebagai salah satu instansi pemerintah yang khusus mengkoordinir sumber-sumber pendapatan daerah dari beberapa OPD pengasil. Adapun perbedaan antara target dengan realisasi seperti pada tabel berikut;

Tabel 1. Perbedaan Realisasi dengan Target Masing-masing Komponen Pajak Daerah Tahun 2015 - 2019

Tahun	PKB	BBN_KB	PBB_KB	AP	Pajak Rokok
-------	-----	--------	--------	----	-------------

2015	102.62	87.98	108.54	162.65	94.31
2016	106.07	87.27	101.77	116.18	83.32
2017	108.62	84.45	99.54	125.44	77.89
2018	109.31	95.43	111.52	120.56	110.34
2019	109.93	108.29	99.46	101.92	97.49



Dapat dilihat kinerja dari OPD atau SDM, kinerja baik (ideal) apabila perencanaan (target) sesuai dengan realisasi. Untuk kinerja PKB, selalu melebihi target minimal 0.7 % - 9.93% melebihi target, karena pemungutan PKB oleh pemerintah (Bapenda) adalah merupakan kewajiban dari masyarakat untuk membayar PKB, hal sangat realitis. Sedangkan untuk BBN_KB sebagian besar tidak pernah memenuhi target, kecuali pada tahun 2019, realisasi melebihi target sebesar 8,29%. Tidak tercapainya target dari tahun 2015 – 2018, banyak yang mempengaruhi, karena BBN_KB khususnya BBN_KB I sangat terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan baru, salah satu

faktornya adalah tingkat pendapatan masyarakat yang tidak bisa diprediksi secara akurat disamping itu pula perilaku masyarakat sekarang sudah mengalami perubahan antara lain membeli motor bukan tujuan yang utama, karena sekarang sudah berkembang serba online dengan demikian minat untuk membeli motor dari masyarakat menurun dan rata-rata kepemilikan motor untuk masyarakat Bali rata-rata 2-3 motor per KK dan faktor-faktor lainnya. Untuk PBB_KB ditentukan oleh pusat, berdasarkan kuota penjualan BBM dalam hal Pertamina, diberika Kuota hal yang sama juga untuk pajak rokok ditentukan oleh pusat.

Tabel 2. Kontribusi Masing-masing Komponen Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2015 – 2019

Tahun	PKB	BBN_KB	PBB_KB	AP	Pajak Rokok
2015	30.54	33.93	13.60	0.09	6.38
2016	34.90	32.01	11.04	0.08	7.23
2017	37.89	28.89	10.52	0.10	7.11
2018	38.59	30.75	10.47	0.09	6.98
2019	38.80	31.23	9.91	0.09	6.07



Tabel tersebut memberikan informasi bahwa, pendapatan daerah Bali sebagian besar disumbang oleh PKB dan BBN_KB, untuk PKB rata-rata kontribusinya terhadap PAD sebesar 37,38 %, sedangkan BBN_KB sebesar 32,35% jadi untuk pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap PAD sebesar 70 %, ini berarti Bali sangat tergantung pada ke komponen tersebut. Apalagi di masa-masa mendatang pencapaian target rasanya semakin sulit, dengan keadaan Bali semakin sembrawat lalu lintasnya, hampir di semua perkotaan di Bali (Badung, Denpasar dan Gianyar) mengalami kemacetan dan disamping itu perilaku masyarakat sudah mengalami perubahan, mereka berpegangan tidak lagi menggunakan kendaraan, tapi dengan memanfaatkan online dalam bertransaksi (Budiasih, 2014). Namun, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada BBN_KB saja karena urgensinya yang selama tahun 2015 sampai 2018 tidak pernah memenuhi target realisasi.

Untuk menghitung potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi). Semua faktor ini mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Kondisi tersebut kemudian akan menentukan; *pertama*, besar kecilnya keinginan pemerintah dalam menetapkan pajak daerah. Ini merupakan

indikasi tinggi rendahnya tuntutan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. *Kedua*, struktur ekonomi dan sosial menentukan kemampuan masyarakat membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002)

Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional, regional dan pengaruh ekonomi global (Adi, 2006; Mulawarman, 2019). Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Upaya ini menuntun kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan didasarkan pada asas manfaat dan keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut maka berbagai sumber daya (*software* dan *hardware*) yang digunakan perlu segera disiapkan (Anggiriawan dkk., 2018; Farooqui & Nagendra, 2014; Saputra & Tama, 2017). Dalam rangka merealisasikan peningkatan penerimaan pajak daerah di masa-masa mendatang (penentuan target), perlu ada ukuran-ukuran (variabel) sebagai faktor-faktor penentu dan metode yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak

daerah (Basri, 2015; Fajriana, 2019; Piliandani & Saputra, 2019).

Studi ini menghitung potensi pajak daerah, serta menghitung target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2021, berupa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Bali berdasarkan realisasi obyek pajak karena pajak tersebut layak untuk diselidiki sebab tidak mencapai target realisasi selama tahun 2015 hingga 2018. Tujuan studi ini adalah untuk menghitung potensi dan target penerimaan pajak daerah Provinsi Bali tahun 2021 khususnya BBNKB. Selanjutnya studi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi Bali (Bappenda) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan penerimaan pajak daerah dalam rangka untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2021.

Kajian Literatur

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting di era otonomi daerah dimana daerah diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada publik (Nuraini dkk., 2018; Pradita dkk., 2019). Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat sasaran dan berhasil guna. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Dwiharyadi dkk., 2012; Frasti dkk., 2017; Putro & Pamudji, 2010). Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan

yang diserahkan kepada Daerah (Saputra dkk., 2018; Sara dkk., 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan meningkatkan kemampuan dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi (Wiratno dkk., 2017). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan (Darwanto & Yustikasari, 2007; Solikin, 2007). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan regulasi yang ada (Nuraini dkk., 2018; Saputra dkk., 2019; Saputra & Tama, 2017).

Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Velte, 2019; Viaene & Zilcha, 2013). pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perauran perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mailoor *et al.*, 2003; Susanto dkk., 2014). Dengan demikian, pajak daerah

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah daerah (Perda) yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Punten, 2008; Sara dkk., 2019). Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai seluruh proses pembangunan khususnya daerah (Adi, 2006; Saputra dkk., 2019). Dari fenomena tersebut dapat diketahui betapa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri karena pajak merupakan pemasukan dana yang sangat potensial (Susanto dkk., 2014).

Metode Penelitian

Menghitung estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di instansi yang terkait, terutama di Bappenda Provinsi Bali, BPS, GAIKINDO, AISI dan beberapa sumber lainnya dari internet yang relevan. Estimasi agregat ini memberi indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada menjadi realisasi. Namun, studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan yang spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi pajak daerah. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi pajak daerah ini, perlu diikuti dengan kajian/kebijakan pada basis mikro guna mengetahui dan hambatan (risiko) yang terjadi di lapangan dan faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi (Sukoharsono, 2006). Dengan demikian, berdasarkan basis teori maka diharapkan pemerintah daerah mampu membuat kebijakan yang spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi.

Model Perhitungan yang digunakan untuk menghitung potensi pajak daerah adalah dengan proyeksi makro, yaitu

menggunakan 1) Pertumbuhan kendaraan (obyek pajak), dengan menggunakan rumus $Y^* = Y_t + Y_{(t-1)} \times (Y_t - Y_{(t-1)})/Y_{(t-1)}$, dimana Y^* = estimasi potensi pajak, Y_t = Realisasi jumlah kendaraan (obyek pajak) pada tahun t , X_t = jumlah kendaraan pada tahun ke t dan $Y_{(t-1)}$ adalah jumlah kendaraan (obyek pajak) pada tahun sebelum. 2) Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Trend dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Setiap peramalan ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian hasil ramalan, keakuratan keseluruhan dari setiap model peramalan dapat dijelaskan dengan membandingkan nilai yang diramal dengan nilai aktual. Ada beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan (*forecast error*) total. Perhitungan ini dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, juga untuk mengawasi peramalan, untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. 3) Regresi linear sederhana. Persamaan garis regresi sederhana dapat ditulis sebagai berikut : $Y^* = a + b X$, dimana Y^* = nilai estimasi (obyek pajak), X = Pendapatan perkapita dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 1 - 5% untuk tahun, 2020 dan 2021 dan nilai koefisien a dan b merupakan parameter yang akan ditaksir. Hasil estimasi dari GAIKINDO dan AISI tahun 2020. Dari ke empat model perhitungan tersebut digabung menjadi perhitungan rata-rata.

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan langsung menyentuh permasalahan adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui instansi yang terkait (Bapenda Provisi Bali), BPS Provinsi Bali, GAIKINDO dan AISI (Internet) dan sumber-sumber lainnya yang relevan dalam kajian ini. Analisis data yang

diperoleh selanjutnya akan diolah dan dilakukan penghitungan dengan menggunakan komputer program Excel, dan program statistik, dengan data yang teredia, selanjutnya, dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat dan sejalan dengan tujuan studi antara lain 1). pertumbuhan Kendaraan ; 2). Trend 3). Regresi dan 4) dan serta Estimasi jumlah kendaraan dari GAIKINDO dan AISI.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memproyeksi BBN_KB I tahun 2021 menggunakan tahun dasar 2011 atau rentang waktu 8 tahun (2011 – 2019), maka hasil proyeksi untuk BBN_KB I untuk tahun 2021 dengan menggunakan alat analisis;

- 1) Regresi linear sederhana dengan variabel bebas pendapatan perkapita dengan asumsi pertumbuhannya sebesar 1% tahun 2020 dan 5% untuk tahun 2021;
- 2) Trend linear;
- 3) Pertumbuhan kendaraan;
- 4) Prediksi tingkat penjualan mobil dari GAIKINDO dan AISI dan
- 5) Gabungan dari 4 metode analisis tersebut.

Data yang digunakan untuk memproyeksikan adalah realisasi dari jumlah kendaraan tahun 2011 – 2019, kemudian dari hasil proyeksi tersebut akan dikalikan dengan tarif rata-rata pada masing-masing jenis kendaraan. Dasar pengenaan tarif digunakan adalah tahun 2019. adapun hasilnya sebagai berikut: hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linear dengan

menggunakan variabel bebasnya pendapatan per kapita penduduk Bali dengan asumsi pertumbuhannya untuk tahun 2020 sebesar 1% dan 2021 sebesar 5 % pertahun, maka target BBN_KB I, untuk tahun 2021 dengan jumlah kendaraan sebesar 205.963 unit atau Rp. 1.176.275.499.259,-. Hasil analisis dengan menggunakan metode Trend linear, dengan menggunakan dasar tahun 2011 (8 tahun) maka target BBN_KB I tahun 2021 dengan jumlah kendaraan sebesar 272.647 unit atau Rp. 1.279.457.379.183,-. Hasil analisis dengan menggunakan metode pertumbuhan jumlah kendaraan, dengan menggunakan dasar tahun 2011 (8 tahun) maka target BBN_KB I tahun 2021 dengan jumlah kendaraan sebesar 202.116 unit atau Rp. 1.180.597.763.628,-. Pangsa pasar kendaraan bermotor di Bali berdasarkan realisasi jumlah kendaraan baru (BBN_KB I) tahun 2019 di dibandingkan dengan pangsa pasar nasional sebesar 2 – 2.5% untuk kendaraan roda 4 dan untuk roda 2 diperkirakan 2.5 – 3 %, sedangkan hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh GAIKINDO dan AISI untuk tahun 2020 dari diperkirakan sebesar 600.000 unit untuk kendaraan roda 4 dan 3.840.000 unit untuk roda 2 di tingkat nasional, mengalami penurunan dari target awal sebesar 1.050.000 unit untuk roda 2 dan 6.400.000 unit untuk roda 2 atau turun 40%, karena pengaruh Covid-19. Hasil proyeksi untuk tahun 2021 diperkirakan jumlah kendaraan sebesar 219.553 unit atau sebesar Rp. 953.964.332.371,-. Dari ke empat metode tersebut dirata-ratakan jumlah kendaraan pada masing-masing jenis, maka jumlah kendaraan tahun 2021 sebesar 225.070 unit atau sebesar Rp. 1.147.573.743.585,-.

Tabel 3. Ringkasan Proyeksi Target BBN_KB I Tahun 2021, serta Tingkat Risiko

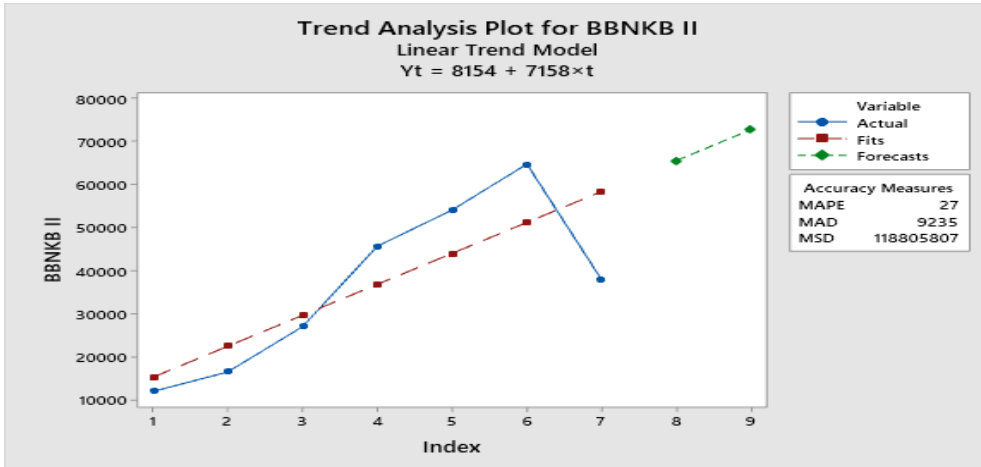
Risiko	Regresi	Trend	Pertumbuhan. Kendr	GAIKINDO+ AISI	Rata-rata
1	2	3	4	5	6
0%	1,176,275,499,259	1,279,457,379,183	1,180,597,763,528	953,964,332,371	1,147,573,743,585
1%	1,164,512,744,266	1,266,662,805,391	1,168,791,785,893	944,424,689,047	1,136,098,006,149
2%	1,152,867,616,823	1,253,996,177,337	1,157,103,868,034	934,980,442,157	1,124,737,026,088
3%	1,141,338,940,655	1,241,456,215,564	1,145,532,829,354	925,630,637,735	1,113,489,655,827
4%	1,129,925,551,249	1,229,041,653,408	1,134,077,501,060	916,374,331,358	1,102,354,759,269
5%	1,118,626,295,736	1,216,751,236,874	1,122,736,726,049	907,210,588,044	1,091,331,211,676
6%	1,107,440,032,779	1,204,583,724,506	1,111,509,358,789	898,138,482,164	1,080,417,899,559
7%	1,096,365,632,451	1,192,537,887,261	1,100,394,265,201	889,157,097,342	1,069,613,720,564
8%	1,085,401,976,126	1,180,612,508,388	1,089,390,322,549	880,265,526,369	1,058,917,583,358
9%	1,074,547,956,365	1,168,806,383,304	1,078,496,419,324	871,462,871,105	1,048,328,407,525
10%	1,063,802,476,802	1,157,118,319,471	1,067,711,455,130	862,748,242,394	1,037,845,123,449
11%	1,053,164,452,034	1,145,547,136,276	1,057,034,340,579	854,120,759,970	1,027,466,672,215
12%	1,042,632,807,513	1,134,091,664,914	1,046,463,997,173	845,579,552,371	1,017,192,005,493
13%	1,032,206,479,438	1,122,750,748,264	1,035,999,357,201	837,123,756,847	1,007,020,085,438
14%	1,021,884,414,644	1,111,523,240,782	1,025,639,363,629	828,752,519,278	996,949,884,583
15%	1,011,665,570,497	1,100,408,008,374	1,015,382,969,993	820,464,994,086	986,980,385,737
16%	1,001,548,914,792	1,089,403,928,290	1,005,229,140,293	812,260,344,145	977,110,581,880
17%	991,533,425,644	1,078,509,889,007	995,176,848,890	804,137,740,703	967,339,476,061
18%	981,618,091,388	1,067,724,790,117	985,225,080,401	796,096,363,296	957,666,081,301
19%	971,801,910,474	1,057,047,542,216	975,372,829,597	788,135,399,663	948,089,420,488
20%	962,083,891,369	1,046,477,066,794	965,619,101,301	780,254,045,667	938,608,526,283

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan empat metode menghasilkan hasil berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tidak terlalu *significant*. Hasil analisis ini sebagai bahan pertimbangan Bapenda dalam menentukan target BBN_KB I untuk tahun 2021. Tercapainya estimasi potensi pajak menjadi realisasi sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan sumber daya manusia (pemunggut pajak) dan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya (Anggiriawan dkk., 2018; Saputra & Tama, 2017). Pada kenyataan sering terjadi potensi estimasi pajak tidak tercapai (tidak sesuai dengan harapan) hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor teknis maupun non teknis dan faktor ekonomi dan non ekonomi. Untuk hal tersebut maka

perlu mempertimbangkan tingkat risiko kemungkinan estimasi potensi pajak tidak sesuai dengan realisasi.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis trend linear, Quadatik dan eksponential growth, dari ke tiga analisis tersebut dengan menggunakan data historis 2013 – 2019. Untuk peramalan BBN_KB II tahun 2021 maka bentuk persamaan yang dihasilkan merupakan hubungan antara variabel dependen (Yt) yang berupa BBN_KB II yang diperkirakan terealisasi di tahun 2021 dan variabel independen (t) berupa deret waktu (tahun). Tampilan perhitungan analisis trend linear menggunakan program komputer *Minitab* untuk BBN_KB II yang teralisasi tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

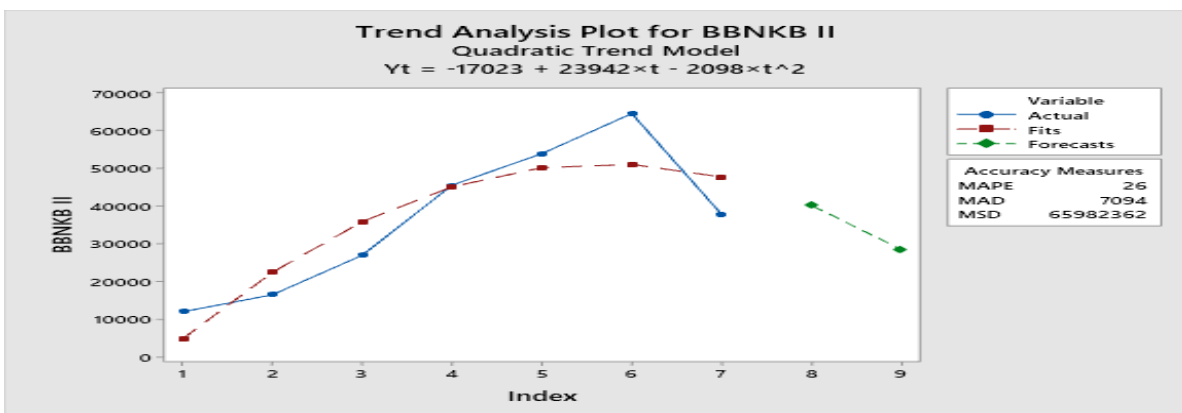
Gambar 1. Hasil Analisis dan Grafik BBN_KB II Menggunakan Trend Linear Tahun 2021



Dari hasil analisis diperoleh pada sehingga model matematis untuk peramalan BBN_KB II adalah $Y_t = 8.154 +$

$7.158 \times t$ dengan nilai kesalahan peramalan, yakni MAPE = 27, MAD = 9.235; MSD = 1.18.805.807

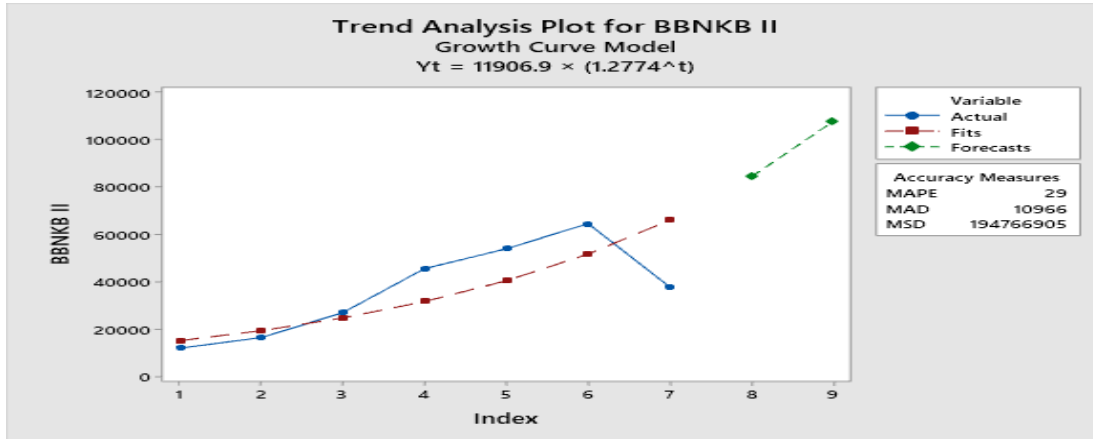
Gambar 2. Hasil Analisis dan Grafik BBN_KB II Menggunakan Trend Kuadrat Tahun 2021



Dari hasil analisis diperoleh pada Gambar 4..., sehingga model matematis untuk peramalan BBN_KB II adalah $Y_t = -17.023 + 23.942 \times t - 2.098 \times t^2$ dengan nilai

kesalahan peramalan, yakni MAPE = 26, MAD = 7.094; MSD = 65.982.362

Gambar 3. Hasil Analisis dan Grafik BBN_KB II Menggunakan Model Pertumbuhan Tahun 2021



Dari hasil analisis diperoleh pada Gambar 5.1, sehingga model matematis untuk peramalan BBN_KB II adalah $Y_t = 11.906,9 \times 1,2774^t$ dengan nilai kesalahan peramalan, yakni MAPE = 29, MAD = 10.966; MSD = 194.766.905

Dari ke tiga model analisis tersebut maka model akan digunakan untuk

meestimasi BBN_KB II tahun 2021 adalah model trend kuadrat karena nilai kesalahan dari peramalannya paling kecil, yang ditunjukkan dari nilai MAPE, MAD dan MSD, maka jumlah kendaraan BBN_KB II untuk tahun 2021 sebesar 28.513 unit, maka kalau di rupiahkan sebesar Rp. 19.030.941.591,-

Tabel 4. Hasil Estimasi BBN_KB II tahun 2021 dan Tingkat Risiko

RISIKO	Hasil Estimasi
0%	19,030,941,591
1%	18,840,632,175
2%	18,463,819,532
3%	17,909,904,946
4%	17,193,508,748
5%	16,333,833,310
6%	15,353,803,312
7%	14,279,037,080
8%	13,136,714,114
9%	11,954,409,843
10%	10,758,968,859

Tercapainya estimasi potensi BBN_KB II menjadi realisasi sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan sumber daya manusia (pemunggut pajak) dan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya. Pada kenyataan sering terjadi potensi estimasi pajak tidak tercapai (tidak sesuai dengan harapan) hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor teknis maupun non teknis dan faktor ekonomi dan non ekonomi (Mulawarman,

2013). Untuk hal tersebut maka perlu mempertimbangkan tingkat risiko kemungkinan estimasi potensi BBN_KB II tidak sesuai dengan realisasi.

Penyebaran Covid-19 secara global telah menyebabkan disrupsi pada rantai kegiatan perekonomian. Secara global, mayoritas negara-negara di dunia menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas (lockdown) sebagai respon pencegahan terhadap

memburuknya pandemi. Kemunculan virus corona (covid-19) mulai terdeteksi pertama kali di negara China pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal oleh tenaga medis dan menyebar ke seluruh dunia yang sampai saat ini belum diketemukan obatnya (vaksin) dan menjadi masalah publik di semua negara baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik, sehingga mendorong pemerintah dari masing-masing negara mengeluarkan langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi efek dari pandemi ini (Uğur & Akbiyik, 2020). Kecepatan menular virus ini membuat setiap negara berlomba dengan waktu untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi negara maupun daerah masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan kasus kematian tertinggi akibat infeksi virus Korona di Asia Tenggara (Uğur & Akbiyik, 2020). Kasus infeksi Corona pertama di Indonesia ditemukan pada awal Maret 2020 yang menimpa dua warga negara Indonesia di Depok, Jawa Barat. Saat kasus pertama kali muncul, pemerintah pusat belum memiliki langkah kebijakan strategis yang didesentralisasi ke pemerintah daerah untuk mencegah pandemi Covid-19 yang akhirnya menyebabkan pandemi masif terjadi di seluruh wilayah di Indonesia (Pfefferbaum & North, 2020)

Peningkatan jumlah pasien positif Corona yang sangat drastis setiap harinya, menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan yang sifatnya wajib untuk mencegah semakin meluasnya infeksi Korona di Indonesia (Megatsari *et al.*, 2020). Efek dari kebijakan ini menyebabkan banyak bisnis ditutup sementara, pembatasan luas pada perjalanan dan mobilitas, gejolak pasar keuangan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tingginya ketidakpastian bagi masyarakat (Aliyyah *et al.*, 2020). Pemerintah daerah tidak hanya mendesentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat, namun juga mengambil berbagai kebijakan tambahan

yang disesuaikan dengan kondisi dan juga tradisi daerahnya masing-masing (Susilawati *et al.*, 2020). Hal ini dilakukan untuk mendukung tujuan dari kebijakan dari pemerintah Pandemi Covid-19 telah menimbulkan gangguan ekonomi yang signifikan di dunia dan di Indonesia. Dampak yang paling berat adalah lapangan pekerjaan yang semakin berkurang, bahkan banyak pekerja mengalami PHK (putus hubungan kerja) dan hal ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan yaitu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat yang tidak mempunyai saving yang cukup untuk menyuhi kebutuhannya (Setyawan & Lestari, 2020). Mengingat kawasan Asia yang sedang berkembang nyaris tidak mengalami pertumbuhan pada tahun 2020, perekonomian Indonesia diperkirakan akan berkontraksi 1,0% pada 2020, demikian menurut prakiraan baru dari Asian Development Bank (ADB). Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,3% pada 2021.

Dampak dari Covid-19 ini sangat dirasakan oleh masyarakat Bali, secara umum karena hampir sebagian besar masyarakat Bali tergantung pada sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, kurang lebih 65% perekonomian Bali ditopang oleh sektor pariwisata, untuk mengurangi dampak tersebut maka banyak kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Bali yang diharapkan dapat menekan laju infeksi korona di daerah Bali. Namun, kebijakan-kebijakan ini ternyata menimbulkan dampak bagi masyarakat, seperti PHK dan juga pembatasan ruang gerak masyarakat, yang paling kena dampaknya adalah pekerja yang terlibat langsung di sektor pariwisata, sehingga perekonomian Bali mengalami kontraksi pertumbuhannya sebesar -1,14% pada triwulan pertama. Pandemi ini pula berdampak pada penurunan daya beli masyarakat Bali yang berdampak terhadap menurunnya PAD provinsi Bali. Seperti diketahui hampir 85% PAD provinsi Bali

ditopang oleh sektor pajak daerah khususnya pajak PKB dan BBN_KB I.

Kesimpulan

Dari ke tiga model analisis yang diajukan oleh peneliti, maka model yang akan digunakan untuk mengestimasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2021 adalah model trend kuadrat karena nilai kesalahan dari peramalannya paling kecil. Untuk itu, realisasi sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan sumber daya manusia (pemunggut pajak) dan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya. Pada kenyataan sering terjadi potensi estimasi pajak tidak tercapai (tidak sesuai dengan harapan) hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor teknis maupun non teknis dan faktor ekonomi dan non ekonomi. Untuk hal tersebut maka perlu mempertimbangkan tingkat risiko kemungkinan estimasi potensi BBN_KB II tidak sesuai dengan realisasi.

Referensi

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi, IX*.
- Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7*(2), 90-109.
- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 2*(September), 1-14.

- Basri, Y. . (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 10*(1), 45-54.
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5*(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5030>
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Dwiharyadi, A., Fontanela, A., & Hatta, E. (2012). Analisis dan evaluasi penatausahaan akuntansi keuangan daerah menuju opini wajar tanpa pengecualian. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 7*(2), 36-45.
- Fajriana, I. (2019). Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi Dan Sikap Love Of Money Dalam Etika Penggelapan Pajak Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah STIE MDP, 8*(2), 107-121.
- Farooqui, M. S., & Nagendra, A. (2014). The Impact of Person Organization Fit on Job Satisfaction and Performance of the Employees. *Procedia Economics and Finance, 11*(14), 122-129. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00182-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00182-8)
- Frasti, H. E., Dita, E. P., Pracinthea, E., Syahputra, A., Widyawati, A., & Hananto, S. T. (2017). Karakteristik Kepala Daerah Dan Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, 21*(1), 21. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.131>
- Gaughan, P. H., & Javalgi, R. (Raj) G. (2018). A framework for analyzing international business and legal ethical standards. *Business Horizons, 61*(6), 813-822.

- <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.07.003>
- Hatta, M., & Riduan, A. (2017). Niat Mahasiswa Akuntansi Berkarir Sebagai Akuntan Di Luar Negeri: Pengujian Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 63-68.
- Ismerdekaningsih, H., & Rahayu, E. S. (2002). *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*.
- Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2003). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan , Budaya Organisasi , Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah , Peran APIP , Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)*. 17, 82-94.
- Mawarni. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal, Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 19-27.
- Megatsari, H., Laksono, A. D., Ibad, M., Herwanto, Y. T., Sarweni, K. P., Geno, R. A. P., & Nugraheni, E. (2020). The community psychosocial burden during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05136.
- Mulawarman, A. D. (2013). Nyanyian Metodologi Akuntansi ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa “Sendiri.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(April). <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7189>
- Mulawarman, A. D. (2019). Tazkiyah: Metodologi Rekonstruksi Akuntansi Pertanian. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4656>
- Nuraini, Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Katalogis*, 6(6), 92-102.
- Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. *New England Journal of Medicine*, 383(6), 510-512.
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291>
- Prihandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13-25.
- Punten, P. D. (2008). *Pengelolaan , Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Desentralisasi Otonomi Daerah (Studi Pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*.
- Putro, N. S., & Pamudji, S. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 33-40.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 306-321.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Saputra, K. A. K., Atmadja, A. T., & Koswara, M. K. (2019). Intervensi

- Regulasi Dan Job Relevant Information Dalam Penerapan Anggaran Koperasi. *ISEI Economic Review*, III(2), 54-59.
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. A. K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Asset Dan Profesional I Sme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 607-622.
- Saputra, K. A. K., & Tama, G. M. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Regulasi Terhadap Penerapan Anggaran Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 16(2), 79-90.
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2019). Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *ISEI Economic Review*, III(2), 45-53.
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 15-20.
- Solikin, I. (2007). *Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal Jawa BaratSukirno, Sadono. 2002. Teori Mikro Ekonomi* (Keempatbel). Rajawali Press.
- Sukoharsono, E. G. (2006). Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi , Phenomenologi , Grounded Theory , Critical Ethnografi dan Case Study. *Analisis Makro Dan Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia*, 230-245.
- Susanto, D., Yusuf, D. A., & Rachmawati, Y. (2014). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma*, 12(02), 73-91.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147-1156.
- Uğur, N. G., & Akbıyık, A. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. *Tourism Management Perspectives*, 36(September), 100744. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744>
- Velte, P. (2019). What do we know about meta-analyses in accounting, auditing, and corporate governance? *Meditari Accountancy Research*, 17-43. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2018-0317>
- Viaene, J. M., & Zilcha, I. (2013). Public funding of higher education. *Journal of Public Economics*, 108, 78-89. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.09.008>
- Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. (2017). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 150. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81>